

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Wan Seng, *Adat dan Pantang Larang Orang Cina*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1994)
- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008)
- Agus Budianto, *Metodologi "Research of Law"*, Diklat Kuliah Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, (2025)
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Beatrix Benni, *Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat menuju Harmonisasi Hukum Waris Di Indonesia*, (Padang: Universitas Andalas, 2016)
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2002)
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Menuju Hukum Keluarga Nasional)*, (Bandung: Armico, 1988)
- H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000)
- H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Surabaya: PT. Refika Aditama, 2015)
- _____, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2014)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2002)
- I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, (Denpasar: Prenada Media Group, 2015)
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003)
- J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Bandung Alumni, 1992)

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005)
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2017)
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Graika, 1996)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Alumni, 2004)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Bandung Pradnya Paramita, 2004)
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, (Bandung: Alumni Bandung, 1981)
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Hak dan Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020)

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)
- Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020)
- Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Thong Kie Tan, *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- Titik Triwulan dan Trianto, *Polygama Perspektif, Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007)
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007)
- Tundjung Herning Sitabuana, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina: Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Mahkamah Agung Nomor: KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama,

Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA / Kumdil / 171 / V/ K/1991 atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991

IS Indische Staatregeling 1926-1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Negara (PMNA/ KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, diubah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Proyek Pembinaan Tekhnis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia 1977, Buku 2 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional di Belanda)

Website :

Henry Sinaga, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d/?page=1>

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Sonny Pungus, “Teori Tujuan Hukum” <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html>

Syafran Sofyan, *Mengapa Perlu Perlindungan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Rakernas II PPAT, 2017)

Yozami, M. A. (2025, January 7). Notaris di dalam pusaran kasus. *Hukumonline*. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bcb721e01/ini-pesan-menkumham-untuk-majelis-kohormatan-notaris>

Journal International

Paramaningrat Manuaba, *et al*, (2018). “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”. *Journal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Vol. 3. 2018. DOI: <http://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>

M. Rizky Pratama dan M. Fajri Mekka Putra, (2022). “Pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta”. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9. 2022. DOI: <http://doi.org/10.31604/justitia.v9i7.3364-3373>

Hasil Penelitian

I. G. Purwaka, “Keterangan Hak Waris yang Dibuat oleh Notaris berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Tesis, Jakarta: Program Studi Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Veni Febrianty, Notaris Kota Tasikmalaya, Jakarta, Tanggal 5 Mei 2025, Pukul 09.00 wib.